

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikrom Wahyudi
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Dana Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tahun 2018

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Kebijakan Pemerintah Desa melalui pengelolaan keuangan terhadap pembangunan merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan dari program Dana Desatersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan kepatuhan, pengawasan dan partisipasi.

Di Desa Jetis pelaksanaan Dana Desadigunakan untuk pembangunan desa dei mendorong kemajuan dan kemandirian Desa. Dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Pengawasan mengawasi kegiatan tersebut. Baik itu dalam hal mengawasi operasional pekerjaan maupun mengawasi anggaran dana yang di butuhkan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian ini adalah pada Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami objek yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber (key informan) dan di wawancarai adalah Kepala Desa dan anggota Badan Permyusyawaratan Desa. Pencatatan wawancara dilakukan secara langsung agar data yang diberikan oleh orang yang diwawancarai lebih valid. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu Reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki sudah berjalan dengan cukup kondusif. Secara absensi kehadiran para petugas BPD tidak pernah absen dalam melakukan tugasnya. Hanya saja yang menjadi kekurangan dari anggota BPD di Desa Jetis adalah kedisiplinan. Anggota BPD sering terlambat baik itu dalam menghadiri musyawarah desa maupun pada saat melakukan pengawasan pada

saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dan Kepala desa dan ketua dari BPD kurang tegas dalam menyikapi kedisiplinan dari anggota BPD. Hal ini terbukti tidak adanya sangsi dari pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan anggota BPD seperti keterlambatan yang kerap sekali dilakukan.

Kata kunci: *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa*

ABSTRACT

Name : Muhammad Ikrom Wahyudi
Study Program : Government science
Title : The Role Of The Village Consultative Body (BPD) in Carrying Out the Function Of Supervision of Village Fund in Jetis Village Besuki District Situbondo Regency in 2018

Village autonomy is the right, authority and obligation to regulate and manage their own government affairs and community interests based on the origin and socio-cultural values that exist in the community to grow and develop following the development of the village. But it must always be remembered that there is no right without obligation, no authority without responsibility and no freedom without limits. Village Government policy through financial management towards development is one form of village autonomy that is proven to be able to encourage the creation of independence, democracy, participation and welfare of village communities. In connection with the objectives of the Village Fund Allocation program above, so that the implementation can be in accordance with applicable regulations and does not deviate from the plans that have been determined, compliance, supervision and participation are needed.

In Jetis Village the implementation of Village Fund Allocation is used for the development of the village of dei encouraging progress and independence of the Village. In its implementation the Village Consultative Body (BPD) has Supervision to supervise these activities. Both in terms of overseeing the work operations and oversee the budget funds needed.

This study aims to find out how the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out the oversight function of the village government in Jetis Village Besuki Subdistrict, Situbondo Regency. The focus of this research is on the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Carrying Out the Oversight Function of the Village Government in Jetis Village, Besuki District, Situbondo Regency. In this study the authors used a qualitative approach in which the research conducted was descriptive in nature to find out or describe the reality of the event under study so as to make it easier for the writer to obtain objective data in order to know and understand the object under study. The key informants and interviewees were the Village Head and members of the Village Consultative Body. Interview recording is done directly so that the data provided by the person being interviewed is more valid. Analysis of the data in this study uses three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification.

From the results of research that has been done The Role of the Village Consultative Body (BPD) In Carrying Out Oversight Functions At The Village Government In Jetis Village Besuki District has been running quite conducive. In attendance, the presence of BPD officials has never been absent in carrying out their duties. It's just that the shortcomings of BPD members in Jetis Village are discipline. BPD members are often late both in attending village meetings and when supervising during the Village Fund Allocation. And the village head and chairman of the BPD are less assertive in responding to the discipline of BPD members. This is proven by the absence of sanctions from violations committed by BPD members such as delays that are often done.

Keywords: *Role of the Village Consultative Body (BPD), Village Government*



